

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Lidya Handayani

Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang
Jl. Srijaya, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang 30128, Indonesia
lidyahandayani876@gmail.com

Bainil Yulina

Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang
Jl. Srijaya, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang 30128, Indonesia
byulina@gmail.com

Anggeraini Oktarida

Prodi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang
Jl. Srijaya, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang 30128, Indonesia
anggeraini_oktarida@polsri.ac.id

Article's History:

Received 16 August 2024; Received in revised form 24 August 2024; Accepted 27 September 2024; Published 1 October 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Handayani, L., Yulina, B., & Oktarinda, A. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 10 (5). 3078-3090.
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i5.3186>

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Metode *Sampling Jenuh* digunakan dalam penelitian objek penelitian adalah 5 Kabupaten serta 2 Kota di Kepulauan Riau yang sudah memberikan laporan keuangannya di tahun 2018-2022. Teknik dalam mengumpulkan yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah. Data dianalisis menggunakan aplikasi Pada penelitian ini digunakan alat analisis berupa program *Statistical Product And Service Solustion* (SPSS) versi 26. Hasil Penelitian Uji hipotesis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Daerah.

Abstract:

This research aims to determine the effect of Regional Own-Source Revenue (PAD), Balancing Funds, and Budget Surplus (SiLPA) on Regional Expenditure in Regencies/Cities in the Riau Islands Province. A saturated sampling method was used in this study, with the research objects being 5 regencies and 2 cities in the Riau Islands that have submitted their financial reports for the years 2018-2022. The data collection technique employed was secondary data obtained from regional government financial reports. The data were analyzed using the Statistical Product and Service Solutions (SPSS) program version 26. The hypothesis testing results indicate that Regional Own-Source Revenue, Balancing Funds, and Budget Surplus positively influence Regional Expenditure in the Regencies/Cities of the Riau Islands Province.

Keywords: Local Original Revenue, Balancing Funds, Surplus Budget Balance, Regional Expenditure.

PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan di sektor publik, kesejahteraan sosial, dan reformasi ekonomi, yang telah membawa perubahan tertentu pada cara hidup negara. Salah satu asas yang terkait dengan proses desentralisasi dalam pembangunan daerah adalah asas desentralisasi dengan proses desentralisasi dalam pembangunan daerah adalah asas desentralisasi. Proses proses desentralisasi dikaitkan dengan otonomi daerah. Dikaitkan untuk otonomi wilayah. Pesatnya cepat pertumbuhan ekonomi di setiap daerah di Indonesia dibarengi dengan munculnya otonomi daerah dan desentralisasi mata uang pertumbuhan ekonomidi setiap daerah di Indonesia diiringi dengan munculnya otonomi daerah dan desentralisasimata uang. Otonomi daerah menekankan peran dan keahlian pemerintah daerah dalam pembangunan, telah meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah adalah peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta negara, kewajiban, hak, wewenang, dan urusan pemerintah yaitu serta kepentingan masyarakat setempat. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pada Pasal 1 Ayat 16 disebutkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 20 ayat 3 menyebutkan bahwa belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lanser, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk belanja daerah benar-benar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah, agar tidak bergantung dengan Dana Transfer, dalam sistem keuangan negara, terdapat tiga jenis dana transfer, yaitu: Dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri, baik itu dari sektor pajak, retribusi hasil produksi, hibah. Peraturan ini menekankan pentingnya pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi PAD dengan mengoptimalkan sektor pajak, retribusi dan lain-lain. Selain itu, peraturan ini juga memberikan aturan mengenai pengelolaan aset daerah yang dapat meningkatkan PAD, serta memperkuat penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan PAD. Pemerintah daerah juga harus menetapkan target PAD yang realistis dan memperhatikan potensi dan kondisi daerah masing-masing, hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara upaya meningkatkan PAD dengan tidak memberatkan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan, (2021:7/PMK.07/2021) tentang mekanisme pendistribusian dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bahwa Dana perimbangan adalah transfer keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan di daerah. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah dan memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola keuangan negara. Dana Perimbangan sebagai bentuk transfer keuangan berfungsi untuk membiayai tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana perimbangan diberikan sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip otonomi daerah yang sejalan dengan konsep desentralisasi dan tugas pembangunan daerah yang semakin kompleks, besaran dana perimbangan ditetapkan berdasarkan kriteria seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, serta kemampuan keuangan daerah. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.05/2021 adalah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2021. SILPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama satu periode anggaran. Pemerintah daerah juga dapat menggunakan sisa anggaran (SILPA) tahun sebelumnya untuk membiayai kegiatannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena utama dalam penelitian ini adalah PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau mengalami *fluktuasi* dari tahun ke tahun. Sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berkontribusi secara signifikan, namun mengalami ketidakstabilan adanya pengaruh ketidakstabilan PAD mengakibatkan perencanaan belanja daerah yang tidak konsisten dan berdampak pada kualitas pelayanan publik, sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau sangat bergantung pada Dana Perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga terjadi

pengaruh ketergantungan yang tinggi pada Dana Perimbangan membuat daerah kurang mandiri dalam pembiayaan pembangunan dan rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal pusat. Tingginya SiLPA di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau mengidentifikasi adanya anggaran yang tidak terserap dengan baik dalam satu tahun anggaran. Sehingga terjadi pengaruh bahwa SiLPA yang tinggi dapat menunjukkan ketidakmampuan dalam merencanakan dan mengeksekusi anggaran dengan efektif, yang berpotensi menghambat pembangunan daerah.

Berdasarkan fenomena dan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau"

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Menurut Sugiono (2019:86-87) menyatakan bahwa "Teori merupakan suatu alur logika serta penalaran yang mempunyai seperangkat konsep, definisi serta proporsisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga kegunaan yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*), dan pengendalian (*control*) suatu indikasi/ gejala".

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan, dimana teori ini merupakan teori utama yang mendasari pengaruh tingkat kepatuhan pengungkapan wajib yang dilakukan pemerintah daerah dijelaskan dengan teori keagenan. Dalam teori agen terdapat hubungan antara dua pihak yang pertama adalah pemilik (*principal*) dan yang kedua manajemen (*agent*). Menurut Kaylee & Harindahyani (2019). "Agen merupakan pihak yang memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan prinsipal, yang tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen"

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah."

Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah "semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan". Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah

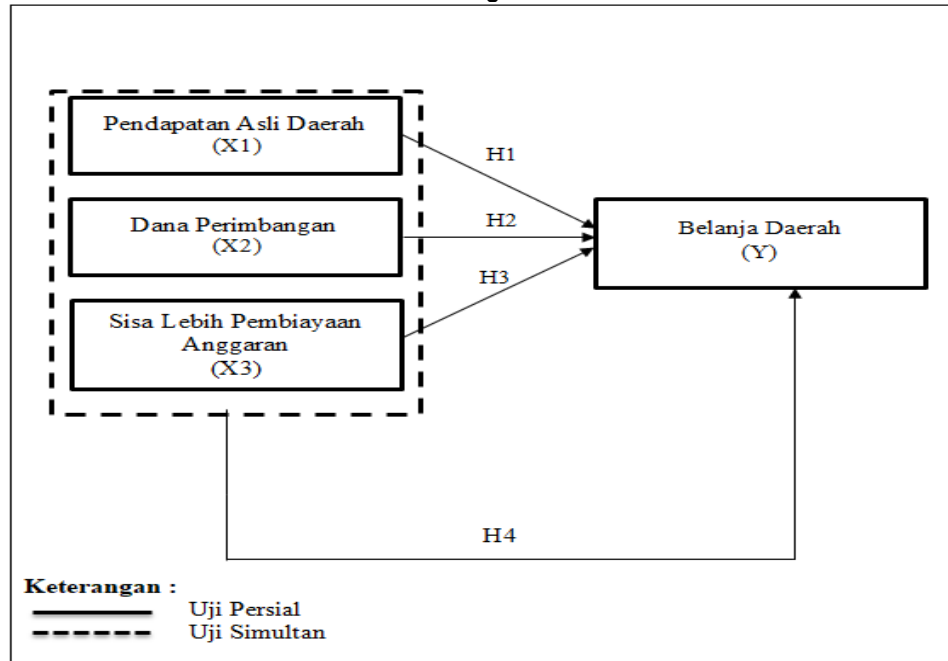
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, yang menunjukkan sejauh mana kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan negara dan pembangunan daerah.

Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah landasan hukum utama yang mengatur tentang Dana Perimbangan di Indonesia. Komponen dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kerangka Pemikiran

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



METODELOGI

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik penelitian ini menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh 7 Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau selama 5 tahun dari Tahun 2018 sampai 2022 sebanyak 35. Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah *sampling jenuh*. Yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang diperoleh dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (www.bpk.go.id) dari Laporan realisasi APBD. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari Analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokolerasi, uji heterokedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, uji parsial (uji t), uji simultan (uji f), uji koefisien determinasi (R^2).

Variabel Penelitian

Tabel 1 Operasional Variabel Penelitian

Nama Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pendapatan Asli Daerah = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD	Rasio

Nama Variabel	Definisi	Indikator	Skala
	(Jumlah realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah)	(Undang-undang No 33 Tahun 2004)	
Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Total dana transfer dari pemerintah pusat bersifat umum).	Dana Alokasi Umum (DAU) = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF) Dimana, Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal-Kapasitas Fiskal (Undang-undang No.33 Tahun 2004)	Rasio
Dana Bagi Hasil	Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	Dana Bagi Hasil = Dana Bagi Hasil Pajak + Dana Bagi Hasil SDA (Undang-undang No. 33 Tahun 2004)	Rasio

Nama Variabel	Definisi	Indikator	Skala
	(Dana dari pusat berupa bagi hasil pemungutan pajak maupun non pajak)		
Dana Alokasi Khusus	Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Total dana transfer dari pemerintah pusat bersifat khusus.)	Perhitungan DAK dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu • Penentuan Daerah tertentu yang menerima DAK a. Kriteria Umum (KU) = $(PAD + DAU + DBH - DBHDR) - \text{Belanja Gaji PNSD}$ b. Kriteria Khusus (KK) c. Kriteria Teknis (KT) • Penentuan Daerah tertentu yang menerima DAK) (PP Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005).	Rasio
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran. Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga terdapat penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.	$\text{SiLPA} = \text{Total Penerimaan Anggaran} - \text{Total Pengeluaran Anggaran}$ (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010)	Rasio
Belanja Daerah	Belanja Daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah baik dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang	$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Operasional} + \text{Belanja Modal} + \text{Belanja Tidak Terduga}$	Rasio

Nama Variabel	Definisi	Indikator	Skala
	merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. (Jumlah anggaran pengeluaran yang baik langsung terkait dengan program atau kegiatan)	(Undang- undang No.32 Tahun 2004)	

Sumber : Data yang diolah, 2024

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh 7 Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau selama 5 tahun dari Tahun 2018 sampai 2022 sebanyak 35. Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah *sampling jenuh*. Yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang diperoleh dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (www.bpk.go.id) dari Laporan realisasi APBD.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat, mengunduh, dan mengelola data, untuk kemudian dilakukan analisis dan penyajian data yang berkaitan dengan penelitian. Selain data sekunder yang berasal dari dokumen, data penelitian ini juga diambil melalui studi pustaka yang berasal dari berbagai penelitian terdahulu yang sejenis, litelatur, jurnal, artikel dan pengetahuan yang dianggap relevan dengan pembahasan. Data juga bersumber di website LHP atas LKPD BPK RI Provinsi di Kepulauan Riau dan Badan Pusat Statistik.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018:275) Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden yang terkumpul. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Untuk mempermudah analisis dan uji hipotesis yang diajukan, data yang berhasil dikumpulkan diolah dengan Software SPSS version 26. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu Teknik analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Selanjutnya teknik analisis regresi linear berganda, uji hipotesis terdiri dari uji koefisien determinan, uji signifikansi parsial (uji t), dan uji signifikansi simultan (uji f).

HASIL DAN PEMBAHASAN (Arial Narrow 11 pt, bold, alignment left, Indentation None, Spacing 6 pt After and Before)

Hasil

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1 Pendapatan Asli Daerah	35	28.79216186	30.68016239	29.85236295	.5017963909
X2.1 Dana Alokasi Umum	35	31.22646883	31.81940984	31.44266854	.1648680726
X2.2 Dana Alokasi Khusus	35	31.22646883	31.81940984	31.44266854	.1648680726
X2.3 Dana Bagi Hasil	35	28.14244281	30.90101689	29.57367595	.8602375566
X3 SiLPA	35	26.93137804	30.92908698	29.48833570	.9795564738
Y Belanja Daerah	35	31.98807174	33.31772890	32.38492390	.3746975450
Valid N (listwise)	35				

Sumber : Data diolah dengan SPSS 26 (2024)

Hasil uji Statistik Deskriptif yang telah diolah pada tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah sampel (N) sebanyak 35. Jumlah rata-rata Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 29,852,362,95 dimana jumlah pendapatan asli daerah terendah sebesar 28,792,161,86. dan tertinggi sebesar 30,680,162,39. dengan standar devisiasi 50,179,639,09. Hasil uji Statistik Deskriptif yang telah diolah bahwa dari jumlah sampel (N) sebanyak 35. Jumlah rata-rata Dana Alokasi Umum (X2.1) sebesar 31,442,668,54 dengan jumlah dana alokasi umum terendah sebesar 31,226,468,83 dan jumlah dana alokasi umum tertinggi sebesar 31,819,409,84 dengan standar devisiasi 16,486,807,26 dari rata-rata. Hasil uji Statistik Deskriptif yang telah diolah dapat dilihat bahwa dari jumlah sampel (N) sebanyak 35. Jumlah rata-rata Dana Alokasi Khusus (X2.2) sebesar 31,442,668,54 dengan jumlah dana alokasi khusus terendah sebesar 31,226,468,83 dan jumlah dana alokasi umum tertinggi sebesar 31,819,409,84 dengan standar devisiasi 16,486,807,26 dari rata-rata. Hasil uji Statistik Deskriptif yang telah diolah dapat dilihat bahwa dari jumlah sampel (N) sebanyak 35. Jumlah rata-rata Dana Bagi Hasil (X2.3) sebesar 29,573,675,95 dengan jumlah dana bagi hasil terendah sebesar 28,142,442,81 dan jumlah dana bagi hasil tertinggi sebesar 30,901,016,89 dengan standar devisiasi 86,023,755,66 dengan standar devisiasi 97,955,647,38 dan Hasil uji Statistik Deskriptif yang telah diolah dapat dilihat bahwa dari jumlah sampel (N) sebanyak 35. Jumlah rata-rata sisa lebih pembiayaan anggaran (X3) sebesar 29,488,335,70 dengan jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran terendah sebesar 26,931,378,04 dan jumlah sisa lebih pembiayaan tertinggi sebesar 30,929,086,98

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.17837724
Most Extreme Differences	Absolute	.145
	Positive	.115
	Negative	-.145
Test Statistic		.145
Asymp. Sig. (2-tailed)		.062 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data diolah dengan SPSS 26 (2024)

Dari hasil *test of normality* diatas maka diketahui hasil uji normalitas dengan kolmogrov-smirnov (K-S) diketahui hasil signifikansi $0,62 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-37.836	6.977		-5.423	.000		
	PAD	.278	.069	.372	4.017	.000	.880	1.137
	DAK	1.945	.223	.856	8.737	.000	.787	1.270
	DBH	.111	.041	.255	2.700	.011	.848	1.179
	SiLPA	-.085	.038	-.223	-2.224	.034	.753	1.327

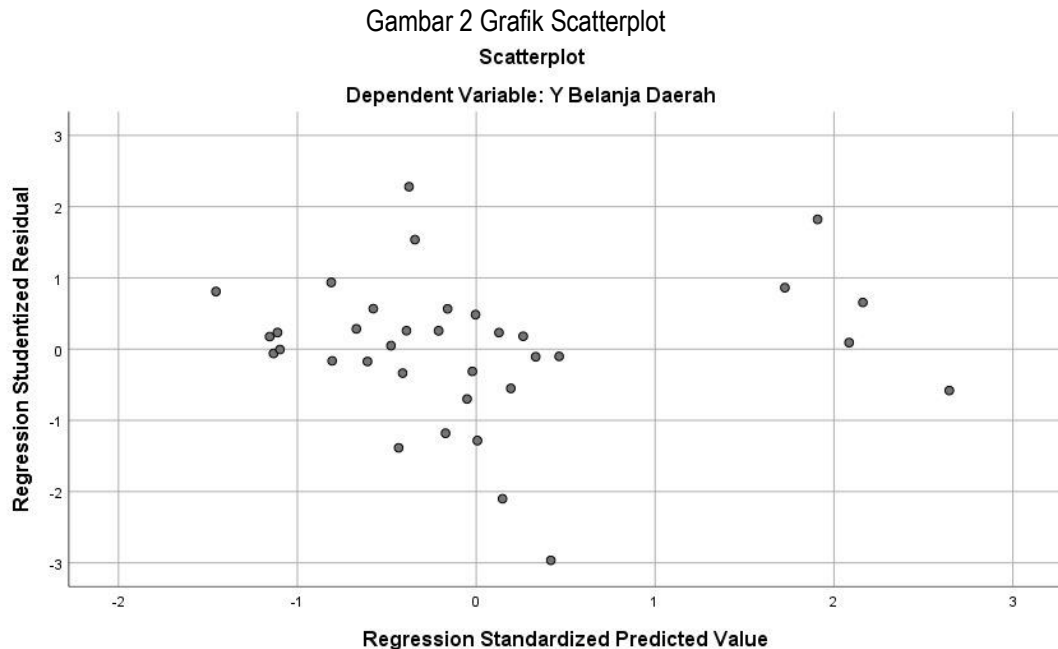
a. Dependent Variable: Y Belanja Daerah

Sumber : Data diolah dengan SPSS 26 (2024)

Hasil Uji Multikolinearitas diatas dapat diperoleh nilai tolerance variabel independennya yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah 880, 787, 848, 753 lebih besar dari 0,10. Sementara itu nilai VIF dari tabel diatas untuk variabel dependennya yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah 1,137 1,270 1,179 1,137 kurang dari 10,00. Berdasarkan uji multikolinearitas tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan yang lain. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber: Data diolah dengan SPSS 26 (2024)

Berdasarkan hasil Scatterplot Model pada gambar 4.8 diatas dapat diketahui bahwa tidak ada pola yang teratur, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis regresi linear berganda

Tabel 5 Analisis regresi linear berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-37.836	6.977		-5.423	.000
PAD	.278	.069	.372	4.017	.000
DAK	1.945	.223	.856	8.737	.000
DBH	.111	.041	.255	2.700	.011
SiLPA	-.085	.038	-.223	-2.224	.034

a. Dependent Variable: Y Belanja Daerah

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26 (2024)

Berdasarkan tabel 5, maka dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja

daerah uji analisis regresi linier berganda maka dapat dibuat persamaan regresi Linier Berganda Sebagai Berikut:

$$\text{Belanja Daerah} = -37.836 + 0.278 \text{ LnPAD} + 1.945 \text{ LnDAK} + 0.111 \text{ LnDBH} + -0.085 \text{ LnSiLPA} + e$$

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi(R²)

Tabel 6 Uji R²

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.965 ^a	.932	.923	.095

a. Predictors: (Constant), SiLPA, PAD, DBH, DAK

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26 (2024)

Dari tabel 6 diatas dapat dijelaskan untuk mengukur seberapa besar hubungan antara independen dengan variabel dependen adalah *R Square* yang ada pada tabel 6 diatas hasil perhitungan statistik diperoleh nilai *R Square* sebesar 0.932 atau 93,2%. Angka tersebut menunjukan besar pengaruh Variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap variabel dependen Belanja Daerah secara gabungan, sedangkan sisanya (100% - 93,2% = 6,8%) dipengaruhi oleh faktor variabel lain di luar penelitian ini atau error

Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Tabel 7 Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-37.836	6.977		-5.423	.000
PAD	.278	.069	.372	4.017	.000
DAK	1.945	.223	.856	8.737	.000
DBH	.111	.041	.255	2.700	.011
SiLPA	-.085	.038	-.223	-2.224	.034

a. Dependent Variable: Y Belanja Daerah

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26 (2024)

Berdasarkan tabel 7 maka dapat dilihat nilai t-hitung dan derajat signifikan tiap variabel independen (Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Khusus (X2), Dana Bagi Hasil (X3), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X4) yang merupakan indikator penerimaan dan penolakan hipotesis. Hasil pengujian hipotesis melalui uji parsial (Uji-t) secara terperinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan output SPSS versi 26 *for windows* didapatkan nilai t-hitung variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 4.017. Untuk menentukan t-tabel, dapat dihitung dengan signifikasi 0,05 dengan derajat kebebasan $df=n-k-1$ atau $df=35-4-1=30$. Hasil yang didapatkan untuk t-tabel sebesar 1.69726. Karena nilai t-hitung < t-tabel atau $4.017 < 1.69726$. Berdasarkan uji signifikasi pada uji-t > 0,05 (dapat dilihat pada tabel 4.6) dengan nilai signifikasi 0,000. Dapat disimpulkan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah (Y)
2. Berdasarkan output SPSS versi 26 *for windows* didapatkan nilai t-hitung variabel Dana Alokasi Khusus (X2) sebesar 8.737 Untuk menentukan t-tabel, dapat dihitung dengan signifikasi 0,05 dengan derajat kebebasan $df=n-k-1$ atau $df=35-4-1=30$. Hasil yang didapatkan untuk t-tabel sebesar 1.69726. Karena nilai

t-hitung < t-tabel atau $8.737 < 1.69726$. Berdasarkan uji signifikansi pada uji-t > 0,05 (dapat dilihat pada tabel 4.6) dengan nilai signifikansi 0,000. Dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (X2) berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah (Y)

3. Berdasarkan output SPSS versi 26 for windows didapatkan nilai t-hitung variabel Dana Bagi Hasil (X3) sebesar 2.700. Untuk menentukan t-tabel, dapat dihitung dengan signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan $df=n-k-1$ atau $df=35-4-1=30$. Hasil yang didapatkan untuk t-tabel sebesar 1.69726. Karena nilai t-hitung < t-tabel atau $2.700 < 1.69726$. Berdasarkan uji signifikansi pada uji-t > 0,05 (dapat dilihat pada tabel 4.6) dengan nilai signifikansi 0,011. Dapat disimpulkan bahwa Variabel Dana Bagi Hasil (X3) berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah (Y)
4. Berdasarkan output SPSS versi 26 for windows didapatkan nilai t-hitung variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X4) sebesar 2.700. Untuk menentukan t-tabel, dapat dihitung dengan signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan $df=n-k-1$ atau $df=35-4-1=30$. Hasil yang didapatkan untuk t-tabel sebesar 1.69726. Karena nilai t-hitung < t-tabel atau $-2.224 < 1.69726$. Berdasarkan uji signifikansi pada uji-t > 0,05 (dapat dilihat pada tabel 4.6) dengan nilai signifikansi 0,34. Dapat disimpulkan bahwa Variabel Dana Bagi Hasil (X4) berpengaruh negatif secara parsial terhadap Belanja Daerah (Y)

Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Tabel 8 Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3.692	4	.923	25.594	.000 ^b
Residual	1.082	30	.036		
Total	4.774	34			

a. Dependent Variable: Y Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), SiLPA, PAD, DBH, DAK

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26 (2024)

Dari tabel 4.7 diatas, dari nilai Sig. sebesar 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi $F < 0,05$ yang berarti secara simultan atau bersama-sama variabel independen didalam penelitian mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji signifikansi-F terdapat nilai F-hitung yaitu sebesar 25,594. Untuk menentukan F-tabel dapat dilihat pada tabel distribusi nilai tabel- $F < 0,05$ dengan rumus $n-k-1$ yaitu $35-4-1= 30$ dengan keterangan k adalah jumlah variabel dan n adalah jumlah data yang diteliti. Hasil yang diperoleh dari tabel distribusi Nilai *F-Probability* yaitu $25,594 > 2,69$ maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

Pembahasan

Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang bersih yang berhak diakui pemerintah daerah yang mana pemerintah daerah berwenang dan memiliki kebebasan dalam hal mengelola sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Semakin tingginya penerimaan PAD akan memaksimalkan pemerintah dalam pembangunan pemerintahan daerah yang berprinsip otonomi daerah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Hasil uji parsial bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja daerah pemerintah daerah Kepulauan Riau Hal ini dapat menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berupa pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan Belanja daerah. Berdasarkan perhitungan statistik mendapatkan hasil bahwa nilai t variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 4.017 yang memiliki arah positif dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. Artinya, variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa Ketika terjadi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka dari sisi pengeluaran Belanja Daerah juga akan meningkat

Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk menyebutkan dana yang dialokasikan khusus untuk daerah tertentu. DAK merupakan bagian dari anggaran pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pembangunan dan program-program khusus di tingkat daerah yang membutuhkan. Tujuan dari DAK adalah untuk membantu daerah-daerah tertentu dalam mengatasi masalah khusus atau mendukung proyek-proyek prioritas yang mungkin tidak dapat sepenuhnya didanai oleh pemerintah daerah setempat. Hasil uji parsial bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja daerah pemerintah daerah Kepulauan Riau. Berdasarkan perhitungan statistik mendapatkan hasil bahwa nilai t variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 8.737 yang memiliki arah positif dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$. Artinya, variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa Ketika terjadi peningkatan penerimaan Dana Alokasi Khusus, maka dari sisi pengeluaran Belanja Daerah juga akan meningkat

Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Dana Bagi Hasil adalah suatu metode pembagian keuntungan atau pendapatan antara dua atau lebih pihak berdasarkan persentase atau porsi yang telah disepakati sebelumnya. Metode ini umumnya digunakan dalam kerjasama bisnis atau proyek di mana pihak-pihak terlibat berkontribusi pada usaha tersebut, baik dengan modal, tenaga kerja, keahlian, atau aset lainnya. Hasil uji parsial bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja daerah pemerintah daerah Sumatera Selatan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dana bagi hasil dapat memberikan kontribusi terhadap belanja daerah dalam berbagai konteks, seperti investasi di pasar modal, kemitraan usaha, sektor pertanian, sektor keuangan (misalnya bagi hasil deposito pada bank syariah), dan proyek-proyek kolaboratif lainnya. Berdasarkan perhitungan statistik mendapatkan hasil bahwa nilai t variabel Dana Bagi Hasil sebesar 2.700 yang memiliki arah positif dan nilai signifikansi $0.011 < 0.05$. Artinya, variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa Ketika terjadi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil, maka dari sisi pengeluaran Belanja Daerah juga akan meningkat

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Daerah

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, mendanai kegiatan lanjutan yang berkaitan dengan beban belanja langsung, seperti belanja barang dan jasa, modal, dan pegawai, dan mendanai kewajiban lainnya yang belum terpenuhi pada akhir tahun anggaran. Pemerintah daerah juga dapat menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya untuk meningkatkan autonomi mereka. SiLPA adalah sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan tahun berjalan. Semakin besar SiLPA, semakin banyak belanja langsung yang dapat digunakan. Berdasarkan perhitungan statistik mendapatkan hasil bahwa nilai t variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar -2.224 yang memiliki arah positif dan nilai signifikansi $0.034 < 0.05$. Artinya, variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa Ketika berpengaruh negatif Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran maka akan Berakibat pada lambatnya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan layanan publik lainnya. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperparah kesenjangan sosial.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis maka diperoleh kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, Dana Bagi Hasil berpengaruh positif secara parsial terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh negatif secara parsial terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi

Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh secara Simultan memiliki pengaruh atau memiliki kontribusi secara signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian sehingga hasil yang akan diperoleh lebih banyak dan beragam. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan variabel lain yang juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan diluar variabel yang diteliti. Untuk itu disarankan agar peneliti selanjutnya menambah variabel atau melakukan penelitian lanjutan.

REFERENSI

- Abdullah, S. (2014). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah: Analisis Perubahan APBD Kabupaten/Kota SeAceh. *Jurnal Telaah Riset Akuntansi*. 7(1). 52-27.
- Marici, S. (2022). Flypaper Effect Pada Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Kabupaten Lebak Dan Pandeglang Provinsi Banten Periode 2014-2019). *Jurnal Riset Akuntansi*. 7(1). 58-77.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2021 tentang mekanisme pendistribusian dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2021. Jakarta.
- Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- Rafi, RN, & Arza, FI (2023). Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5 (1), 411-427.